

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang masih berkembang, namun pembangunan-pembangunan yang dilakukan cukup membuktikan bahwa Indonesia selalu mencoba untuk menjadi negara yang mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan bangsanya, hal itu terangkum dalam visi dan misi dari pembangunan nasional untuk menciptakan bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Oleh karena itu segala daya dan upaya dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional) dimana mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya¹. Dalam hal ini pembangunan dianggap sebagai suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dalam segala aspek di masyarakat dan pada pelaksanaannya diperlukan pemahaman hingga perencanaan yang matang. Salah satu tujuan adanya pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut mengakibatkan pembangunan selalu dituntut untuk menghasilkan pembangunan yang merata.

Pembangunan yang sangat gencar dilakukan saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disebabkan infrastruktur dianggap sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur berdasarkan fungsi dan

¹ Raharjo Adisasmita, *"Pembangunan PeDesaan dan Perkotaan"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu) 2006, hl.116

peruntukannya dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Infrastruktur ekonomi diantaranya *utilitas* publik yaitu tenaga listrik, telekomunikasi, sanitasi, pembuangan dan gas. Kemudian yang termasuk pekerjaan umum yaitu jalan, bendungan, irigasi, drainase dan proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.²

Setiap pembangunan yang datang dari program-program pemerintah biasa disebut pembangunan konvensional. Namun aspek yang dituju pemerintah dalam pembangunan konvensional ini adalah ekonomi. Pembangunan konvensional berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan, sebabnya karena pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan, dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting.³

Ketika pembangunan hanya bertujuan untuk pemenuhan ekonomi nasional, maka akan berdampak pada aspek lainnya sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan, padahal dalam peraturan daerah provinsi Jawa Barat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi :

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada

² Bagus Teguh Pamungkas, *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Administrasi /Institusi terhadap Pertumbuhan Propinsi-propinsi di Indonesia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, hl.4

³ Iwan J Azis dkk, *“Pembangunan berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim”*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia) 2010, hl.22

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka strategi yang dibutuhkan dalam pembangunan mengacu pada beberapa hal yang diantaranya harus mampu melihat jauh ke depan sehingga setiap tindakan yang akan dilakukan saat ini dapat diestimasi permasalahan yang akan muncul di masa depan, kemudian peranan dimensi ruang dan waktu dimana keduanya akan berhasil jika didukung oleh sosial budaya dan antisipasi perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Jika tidak ada pertimbangan kedepannya, maka pembangunan tersebut justru menimbulkan konflik. Meskipun tujuan pembangunan berorientasikan pada masa depan, namun konflik senantiasa muncul dalam pelaksanaannya.

Pembangunan infrastruktur selalu berkaitan erat dengan masalah agraria dimana pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur lekat dengan penggusuran dan menjadi salah satu proses yang memiliki kontribusi dalam menimbulkan ketimpangan agraria. Adapun salah satu sumber munculnya konflik dalam pembangunan berupa persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Konflik merupakan suatu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dalam berperilaku yang saling bertentangan, perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan dan tuntutan. Dalam pengertian lain konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *“Kamus Sosiologi”*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada) 1993, hl. 99

Konflik dikatakan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.⁵ Konflik menjadi suatu kenyataan hidup yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi ketika tujuan masyarakat tidak lagi sejalan. Konflik dapat terjadi apabila muncul perbedaan kepentingan dalam masyarakat, sehingga untuk mempertahankan kepentingan tersebut masyarakat akan menggunakan segala cara dalam mewujudkannya, termasuk menggunakan cara kekerasan yang bertentangan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat.

Perbedaan kepentingan adalah salah satu faktor utama yang dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.⁶

Berdasarkan hal tersebut awal terjadinya suatu konflik sosial bisa disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik tersebut bersifat kompleks yang melibatkan berbagai unsur di masyarakat. Setiap kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat pun tidak bisa secara langsung diatasi secara bersamaan karena akan saling berbenturan satu sama lain.

Konflik sosial merupakan bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan dan menghancurkan. Konflik sosial dianggap sebagai proses bertemunya dua

⁵ Robert Lawang, *"Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi"* (Jakarta: Universitas terbuka) 1994, hl.53

⁶ Pruiit Dean dan Jeffrey Rubin, *"Teori Konflik Sosial"* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 2011 , hl.10

pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.⁷ Namun, Lewis A Coser menjelaskan bahwa konflik tidak hanya berwajah negatif, konflik memiliki fungsi positif melalui perubahan-perubahan yang diakibatkannya, yang termasuk ke dalam fungsi positif Coser adalah dengan adanya *Safety valve*.

Menurut Coser, *Safety valve* atau katup penyelamat merupakan suatu cara untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan munculnya konflik sosial dengan cara memperbaiki keadaan suatu kelompok yang mengalami konflik, mengungkapkan rasa tidak puas terhadap struktur, dan menghambat permusuhan.⁸

Desa Hegarmanah saat ini sedang berada dalam kondisi yang berpotensi mengalami konflik sosial. hal itu disebabkan oleh salah satu program pemerintah Jawa Barat yang bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia untuk melakukan reaktivasi terhadap empat jalur kereta non-aktif PT. Kereta Api Indonesia berupaya mengembangkan jaringan perkereta-apian demi meningkatkan konektivitas antar wilayah. Reaktivasi tersebut diyakini akan sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi dan pariwisata serta memudahkan akses menuju beberapa daerah yang menjadi tujuan masyarakat. Jalur kereta api ini diharapkan dapat mengatasi problematika kemacetan pada jalur-jalur yang biasanya hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor dan mobil. Perlu diketahui di sebagian wilayah Desa Hegarmanah terdapat jalur kereta api non-aktif bekas jajahan Belanda, namun jalur tersebut sudah tidak digunakan kurang lebih empat puluh tahun.

⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, "*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*" (Yogyakarta : Kencana Prenada Grup) 2014, hl.8

⁸ Widiastuti, "*Mencari Safety Valve untuk Togaten*" (Semarang: DIPA IAIN) 2014, hl.65

Berdasarkan rencana reaktivasi jalur kereta api, memiliki kemungkinan mengalami konflik sosial, hal ini diakibatkan wilayah yang akan dijadikan lokasi reaktivasi merupakan pemukiman pada penduduk dan juga akses jalan bagi para pejalan kaki. Hal ini akan mendorong dilakukannya penggusuran guna memperlancar proses reaktivasi.

Reaktivasi rel kereta api sebelumnya pernah direncanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia, namun tidak dapat terealisasi karena berbagai kendala termasuk penolakan warga Desa Hegarmanah di tahun 2005. Warga melakukan tuntutan ke dinas pertanahan Kabupaten Sumedang menuntut hak tanah yang mereka tempati dengan hasil di menangkan PT. Kereta Api Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi warga yang merasa keputusan sama sekali tidak adil. Meskipun gugatan dimenangkan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia, warga tetap mengklaim tanah tersebut adalah milik mereka.

Apabila melihat dari sisi sejarah, tanah yang menjadi proyek reaktivasi jalur kereta merupakan tanah bekas jajahan kolonial Belanda. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959 (LN 1959 Nomor 5) disebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang termasuk harta kekayaan perusahaan milik Belanda dikenakan nasionalisasi sesuai dengan pasal 1 undang-undang tersebut, sejak perusahaan yang bersangkutan dinasionalisasi akan di hapus sesuai hukum, sehingga tanah yang bersangkutan menjadi milik negara. Meskipun pihak PT. Kereta Api Indonesia telah memenangkan tuntutan dan dikuatkan dengan Undang-undang yang ada, warga tetap pada pendiriannya untuk menolak. Hal tersebut dilakukan karena warga merasa hasil keputusan sidang tidak masuk akal ditambah

pernyataan warga yang merasa rutin membayar pajak bumi dan bangunan sehingga menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah hak mereka.

Saat ini rencana reaktivasi kembali muncul. Akibat dari rencana tersebut warga yang tinggal di wilayah reaktivasi mulai mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka, karena nilai tanah yang akan di reaktivasi tersebut bukan sekedar tempat mereka membangun rumah, namun banyak yang menggantungkan per-ekonomiannya dengan membuka usaha di wilayah tersebut. Desa Hegarmanah merupakan desa yang sangat berdekatan dengan empat perguruan tinggi di Jatinangor, hal tersebut menjadi alasan mengapa saat ini banyak warga Desa Hegarmanah menggantungkan per-ekonomiannya karena dari tempat itulah sumber mata pencahariannya. Berdasarkan penjelasan diatas, reaktivasi jalur kereta api ini berpotensi menimbulkan konflik sosial pada warga Desa Hegarmanah, apabila reaktivasi tetap dilakukan tanpa adanya solusi yang diberikan kepada warga maka akan menimbulkan pergerakan sehingga dapat menimbulkan sikap saling mengancam, menekan bahkan menghancurkan sebagai luapan kemarahan warga. Karena jika reaktivasi dilakukan maka akan terjadi penggusuran besar-besaran di wilayah Desa Hegarmanah dan dapat berakibat munculnya masalah-masalah sosial.

Apabila reaktivasi tetap dilakukan dan klaim warga tidak kuat, warga pun meminta timbal balik dari pihak PT.Kereta Api Indonesia berupa ganti rugi dan juga relokasi ke tempat yang tidak jauh dari pemukiman mereka. Hal tersebut tentu saja akan menjadi masalah kembali karena jika PT. Kereta Api Indonesia adalah pemilik sah tanah, pihak mereka tidak memiliki kewajiban memenuhi

tuntutan warga Desa Hegarmanah. Meskipun ada upaya ganti rugi, menurut informasi yang beredar di masyarakat, nominal uang yang akan diberikan adalah senilai Rp. 250.000/meter² yang berlaku pada bangunan-bangunan permanen khususnya fasilitas-fasilitas umum. Dan senilai Rp. 200.000/meter² untuk bangunan tidak permanen.

Sampai saat ini, keputusan reaktivasi jalur kereta api di Desa Hegarmanah belum mencapai keputusan akhir, hal ini disebabkan bahwa PT. Kereta Api masih melakukan pemetaan terhadap wilayah yang akan direaktivasi dan proses *monitoring*.

Apabila reaktivasi jalur kereta api tetap dijalankan tanpa adanya solusi yang diberikan kepada warga yang bersangkutan, maka bukan tidak mungkin warga akan melakukan pergerakan untuk menuntut tuntutan mereka agar bisa dipenuhi, karena dalam hal ini masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan tempat tinggal mereka serta mendapatkan keadilan apabila tempat tinggal mereka harus digusur.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang potensi konflik sosial akibat reaktivasi jalur kereta api, maka perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kondisi sosial warga Desa Hegarmanah sesudah munculnya rencana reaktivasi jalur kereta api, apa saja faktor penyebab munculnya penolakan warga masyarakat terhadap reaktivasi jalur kereta api dan selain itu peneliti juga akan mengkaji tentang bagaimana *Safety Valve* konflik sosial akibat reaktivasi jalur kereta api di Desa Hegarmanah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Munculnya respon berupa penolakan warga Desa Hegarmanah terhadap rencana reaktivasi.
2. Munculnya klaim dari masing-masing pihak dalam memperebutkan tanah yang akan direaktivasi
3. Warga Desa Hegarmanah menjadikan bukti berupa Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bukti kepemilikan.
4. Warga tidak dapat menerima apabila ganti rugi tidak sesuai dengan tuntutan mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Masalah yang akan dibahas adalah potensi konflik sosial akibat reaktivasi jalur kereta api, Maka rumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Sosial Sesudah Munculnya Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api di Desa Hegarmanah?
2. Apa Faktor Penyebab Munculnya Penolakan Warga Masyarakat Terhadap Reaktivasi Jalur Kereta Api di Desa Hegarmanah?
3. Bagaimana *Safety Valve* Konflik Sosil Akibat Reaktivasi Jalur Kereta Api di Desa Hegarmanah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi konflik sosial akibat reaktivasi jalur kereta api. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Kondisi Sosial Sesudah Munculnya Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api di Desa Hegarmanah.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Munculnya Penolakan Warga Masyarakat Terhadap Reaktivasi Jalur Kereta Api di Desa Hegarmanah.
3. Untuk Mengetahui *Safety Valve* Konflik Sosial Akibat Reaktivasi Jalur Kereta Api di Desa Hegarmanah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperdalam ilmu, pengalaman dan pengetahuann khususnya tentang potensi konflik sosial akibat reaktivasi jalur kereta api. Memberikan manfaat secara teoritis dalam memahami konflik sosial. sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di dunia pendidikan

2. Kegunaan Praktis

Manfaat bagi universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi tentang kajian konflik. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan

informasi dan menambah wawasan mengenai kajian praktik masalah konflik sosial. Bagi Masyarakat secara praktis penelitian ini berguna bagi masyarakat dalam mengenali segala perilaku baik dan buruk sehingga tidak terjerumus kepada pilihan yang merugikannya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Semua jenis penelitian pasti memerlukan kerangka pemikiran sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian, hal tersebut berguna untuk menghindari perluasan pengertian yang mengakibatkan penelitian menjadi tidak terfokus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang mendukung atau yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Setiap pembangunan yang dilakukan di suatu daerah selalu memiliki tujuan yang mengarah pada pemerataan ekonomi. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu mengejar ketertinggalan suatu daerah dan mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antara penduduk sebuah daerah dengan penduduk daerah lainnya. Namun dalam proses pembangunan tersebut, kerap kali menimbulkan permasalahan lain yang dapat menghambat keberlangsungan pembangunan, salah satunya berasal dari masyarakat. Tidak jarang hambatan tersebut akhirnya menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan. Adapun definisi konflik sosial adalah suatu perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan dan adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan.⁹ Setiap individu

⁹ Soerjono Soekanto, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, (Jakarta : Rajawali Pers) 2012, hlm-91

ataupun kelompok biasanya berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan apabila mereka memiliki perbedaan kepentingan. meskipun tidak semua konflik berakhir dengan adanya kekerasan, namun apabila kedua belah pihak yang bersangkutan tidak juga menemukan titik temu dalam penyelesaian konflik, maka akan berujung pada kekerasan.

Konflik merupakan proses disosiatif sebagai bentuk proses sosial. Apabila konflik diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. sebaliknya jika konflik terjadi ditengah masyarakat yang tidak mampu mengelola dan mengatasi dengan baik, maka konflik akan menimbulkan dampak buruk dan menimbulkan kerusakan.¹⁰

Lewis A Coser adalah salah satu tokoh yang mencoba memperlihatkan fungsi positif dimana konflik dapat meningkatkan integrasi sosial, konflik antara kelompok juga dapat meningkatkan solidaritas internal dalam kelompok-kelompok yang berkonflik¹¹ Saat terjadi konflik dengan pihak luar, maka secara spontan anggota kelompok akan memperkuat integrasi sosial untuk menghadapi lawan dari luar. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat konflik dapat memperkuat batas antara kelompok tersebut dengan kelompok lainnya, khususnya yang secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Meskipun demikian, konflik sosial tetap harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh salah satu pihak, baik dalam posisinya sebagai pihak yang

¹⁴ Irwandi dan Endah R. Chotim, *"Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah dan Swasta studi kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung"*, JISPO Vol 7 No 2, 2017, hlm-25

¹¹ Ambo Upe, *"Tradisi Aliran dalam Sosiologi"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo) 2010, hlm-166

terlibat maupun pihak ketiga yang tidak memiliki keterlibatan namun berusaha untuk membantu pihak yang terlibat.

Coser memberikan tawarannya melalui pokok teori konflik sosial, yaitu adanya *safety valve* atau katup penyelamat. *Safety valve* merupakan salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan terjadinya konflik sosial. Katup penyelamat akan mengatur apabila terjadi suatu konflik agar tidak merusak semua struktur yang ada dan membantu memperbaiki keadaan suatu kelompok yang mengalami konflik.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, konflik sosial Coser memiliki keterkaitan erat dengan apa yang saat ini terjadi di Desa Hegarmanah, dengan adanya rencana reaktivasi jalur kereta api, masyarakat memberikan respon yang beragam. Namun mayoritas warga menolak rencana tersebut, hal itu dilatarbelakangi oleh klaim warga atas tanah yang akan dijadikan rel kereta api dan penilaian warga mengenai dampak yang akan timbul apabila reaktivasi tetap dijalankan. Warga Desa Hegarmanah menilai bahwa reaktivasi jalur kereta ini justru hanya akan menimbulkan banyak kerugian pada warga setempat dibanding keuntungannya. Meskipun warga pada awalnya menolak secara tegas rencana reaktivasi, warga pun tetap mempertimbangkan apabila mereka kalah dalam mempertahankan tanah. Warga menuntut pihak yang bersangkutan untuk mengganti rugi dan relokasi bagi warga yang terkena dampak reaktivasi, hal tersebut sebagai upaya agar kedua-belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak, terutama

¹² Limas Dodi, "Membaca Pemikiran Lewis A Coser dalam Teori Fungsional Tentang Konflik", Jurnal Al-Adi Vol.10 No.1, Januari 2017. Hl.116

warga yang tinggal di Desa Hegarmanah. Adapun skema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1 Skema Konseptual

